

# Implementasikan Teknologi Rendah Karbon, Kerja Sama Joint Crediting Mechanism Turut Mitigasi Perubahan Iklim



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**SIARAN PERS**

**HM.4.6/16/SET.M.EKON.3/01/2023**

## **Implementasikan Teknologi Rendah Karbon, Kerja Sama *Joint Crediting Mechanism* Turut Mitigasi Perubahan Iklim**

**Jakarta, 19 Januari 2023**

Untuk turut memitigasi perubahan iklim, Indonesia dan Jepang melakukan kerja sama bilateral dalam skema *Joint Crediting Mechanism* (JCM) dengan menggunakan fasilitasi teknologi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Jepang. Kerja sama JCM yang baru-baru ini disepakati untuk diperpanjang hingga tahun 2030, telah diinisiasi sejak tahun 2013.

Implementasi JCM sendiri dilakukan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang terkait dan bertujuan untuk mendorong kerja sama implementasi teknologi rendah karbon sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Selain itu juga untuk memfasilitasi penyebaran teknologi, produk, sistem, layanan, dan infrastruktur rendah karbon, serta meningkatkan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Keberhasilan implementasi proyek JCM telah mendorong replikasi berbagai teknologi rendah karbon di Indonesia. Sampai akhir 2022, tercatat 52 proyek JCM di Indonesia yang terdiri dari 48 *Model Project*, 3 *Demonstration Project*, dan 1 JFJCM. Sektor JCM antara lain meliputi, *chiller*, *boiler*, Solar PV, pembangkit biomassa, *waste heat recovery*, LED, dan panas bumi,” ungkap Asisten Deputi Kerja Sama

Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto dalam acara media *briefing* “Implementasi JCM di Indonesia Tahun 2022” di Media Center, Kemenko Perekonomian, Kamis (19/01).

Pada kesempatan tersebut, Hiroshi Nishimoto selaku First Secretary Energy and Natural Resources pada Kedutaan Besar Jepang menyampaikan bahwa Jepang telah bermitra dengan 25 negara dalam kerja sama proyek JCM di antaranya dengan Indonesia, Vietnam, Mongolia, Meksiko, Arab Saudi, Chili, Senegal, Tunisia, Azerbaijan, Moldova, Georgia, dan Uzbekistan. Selain itu, terdapat 227 proyek yang tersebar di berbagai belahan dunia di mana Indonesia menjadi negara yang paling banyak mengimplementasikan proyek JCM.

Implementasi JCM di Indonesia dilakukan secara bersama antara pihak Indonesia dan Jepang dengan menerapkan prinsip *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) sebagai dasar bagi pelaksanaan proyek. Penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proyek JCM, dibagi untuk kedua negara yang dapat digunakan untuk memenuhi target penurunan emisi masing-masing.

Skema pendanaan JCM sendiri meliputi *Model Project* yang berupa dukungan pendanaan dari Ministry of Environment Japan (MOEJ) sampai dengan 50% dari total investasi proyek, *Demonstration Project* yang merupakan dukungan pendanaan dari Ministry of Economic, Trade, and Industry (METI) Japan yang dapat mencapai lebih dari 50% total investasi proyek, serta Japan Fund for JCM (JFJCM) yang merupakan *trust fund* yang dikelola oleh Asian Development Bank (ADB) dengan sumber pendanaan dari Pemerintah Jepang.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan rendah karbon di tingkat kota, JCM juga memberikan dukungan melalui skema kerja sama antar kota di Indonesia dan Jepang. Sampai saat ini, terdapat 5 kota di Indonesia yang telah bergabung dan bekerja sama dengan 4 kota di Jepang dalam melakukan *Feasibility Studies* yaitu Surabaya dengan Kitakyushu, Bandung dengan Kawasaki, Batam dengan Yokohama, Semarang dengan Toyama, dan Jakarta dengan Kawasaki.

Informasi lebih jauh mengenai JCM dapat diperoleh dengan mengunjungi situs JCM di [jcm.go.jp](http://jcm.go.jp) dan [jcm.ekon.go.id](http://jcm.ekon.go.id). (dep7/rep/fsr)

\*\*\*

**Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan**

**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

**Haryo Limanseto**

Website: [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: [humas@ekon.go.id](mailto:humas@ekon.go.id)

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia